BAB III

PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM HAMBALI TENTANG

IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA

A. PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM HAMBALI

1. Pendapat Imam Hanafi

Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah, tidak ada iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar'i, karena iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayah, tetapi kepada ibunya. Pendapatnya berlandaskan kepada hadits Nabi S.a.w. :

الْوَالِدُ لِلْفِرَاسِ وَالْفَاهِرُ الْحَجَرُ (رواه البخاري)

"Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasi), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa".

Perlu diketahui bahwa kata al hajar yang dimaksudkan dalam hadits ini ialah al khaibah, artinya sesuatu yang tak ada nilainya. Ada kaum yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan al hajar adalah rajam, Ibnu Atsir berkata : bahwa hal ini benar, karena tidak semua pezina dihukum rajam. (Ibn Atsir, III, 1979 : 343).

Kalau sperma zina tidak dihormati, maka tidak mencegah akad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hamil karena zina. Hanya saja, tidak boleh menikahinya sebelum ia melahirkan.

Pendapat diatas memang ada positifnya, yaitu dapat menutup aib sang wanita.

Akan tetapi Hanafi mengatakan : boleh melakukan akad nikah dengan wanita hamil akibat zina, tetapi tidak boleh mencampurinya hingga melahirkan, dan baru sesudah itu boleh dicampuri (Jawad Mughniyah, 1996 : 466).

2. Pendapat Imam Hambali

Hambali berpendapat bahwa wanita hamil karena zina wajib iddah sebagaimana halnya pada orang yang ditalak. Dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan.

Pendapat tersebut didasarkan kepada sabda Nabi S.a.w. :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكُ مَاءَهُ نَزَعَ غَيْرَهُ (رواه أبو داود)

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain (Al Jaziri 1994 : 513).

Dasar berikutnya adalah :

لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ (رواه أبو داود)

“Perempuan hamil dilarang dinikahi sampai ia melahirkan.” (H.R. Abu Dawud). Hambali mewajibkan iddah karena pada dasarnya menginginkan kesucian rahim. Iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan, dan setelah melahirkan masih ada syarat lagi yaitu taubat.

Pendapat ini, ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera-puteri mereka. Orang-orang beranggapan bahwa wanita hamil akibat zina akan mendapat perlakuan yang tidak baik ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi para keluarga untuk mengawasi putera-puterinya dengan baik agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina (Huzaimah T. Yanggo, 1996 :)

Untuk lebih jelasnya, kiranya penulis juga perlu menjelaskan mengenai beberapa pendapat serta syarat-syarat bagi perempuan hamil karena zina. Bahwa iddah hamil karena zina itu hukumnya sama dengan iddah bagi perempuan yang hamil, yaitu :

- a. Hanafi mengatakan bahwa iddah hamil karena zina itu adalah sampai melahirkan kandungannya, tapi dengan syarat :
 - Kandungannya itu harus benar-benar terpisah dari rahimnya secara keseluruhan jika yang keluar itu hanya sebagian saja, maka iddahnya belum selesai.
 - Kandungannya itu sudah berwujud manusia, tetapi jika hal itu gugur berupa segumpal daging dan tidak sejenis bentuknya, maka iddahnya selesai dengan gugurnya kandungan tersebut. Tetapi masih harus menjalani iddah tiga kali haid.
 - Jika kandungan itu kembar, maka iddahnya baru selesai dengan lahirnya kandungan bayi yang terakhir.

b. Menurut Hambali bahwa iddah bagi perempuan yang hamil karena zina adalah sampai melahirkan kandungannya. Dengan syarat sebagai berikut :

- Kandungan itu bisa dipertemukan nasabnya kepada mantan suami ibunya. Jika mantan suami itu mengalami lemah syahwat sehingga ia tidak bisa bersetubuh dan kemudian suami tersebut meninggal sedangkan isterinya ternyata dalam keadaan hamil, maka iddahnya belum selesai sekalipun ia telah melahirkan. Dan apabila kandungan itu tidak bisa dipertemukan nasabnya kepada mantan suami ibunya, maka ia wajib beriddah 4 bulan 10 bulan terhitung sesudah melahirkan. Kemudian kalau hamilnya itu dilakukan dengan berzina, maka ia wajib beriddah tiga kali quru' setelah melahirkan. Oleh karena itu menurut golongan ini wajib beriddah bagi perempuan yang melakukan persetubuhan baik dengan akad yang sah fasid ataupun zina.
- Jika bayi yang dikandungnya itu kembar, maka iddahnya baru selesai dengan lahirnya bayi yang terakhir.
- Jika kandungan itu mengalami keguguran, maka iddahnya sampai rahim bersih (Al-Jaziri, 1994 : 522).

Demikianlah pendapat Hanafi dan Hambali tentang iddah perempuan hamil karena zina. Dimana pada prinsipnya, dapat kita ketahui terdapat dua pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Disatu pihak berpendapat tidak ada iddah bagi perempuan yang hamil karena zina. Sedangkan dipihak lain berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina wajib beriddah.

kecuali setelah melahirkan bayi yang terakhir.

- Kandungan itu sudah sempurna menjadi manusia. Jika kandungan itu lahir berupa segumpal daging, maka iddahnya wanita tersebut belum selesai (Al Jaziri, 1994 : 522).

Demikianlah pendapat Hanafi dan Hambali tentang iddah perempuan hamil karena zina. Dimana pada prinsipnya, dapat kita ketahui terdapat dua pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Disatu pihak berpendapat tidak ada iddah bagi perempuan yang hamil karena zina. Sedangkan dipihak lain berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina wajib beriddah.

Bagi pihak yang berpendapat bahwa tidak ada iddah bagi perempuan yang hamil karena zina, beralasan bahwa sebab wajibnya iddah tersebut karena adanya akad yang sah serta persetubuhan pula, sehingga ia tidak wajib beriddah.

Pada faktor lain iddah itu manfaatnya untuk menjaga keturunan agar tidak bercampur baur antara keturunan yang satu dengan lainnya. Sejalan dengan itu pula iddah memberi kesempatan berfikir bagi suami agar bisa meninjau kembali keputusannya. Sedangkan orang yang berzina sama sekali tidak dibebani hal tersebut (Jawad Mughniyah, 1996 : 474).

Sedangkan bagi pihak yang mewajibkan iddah atas perempuan yang hamil karena zina, maka beralasan bahwa sebab wajibnya itu adalah

karena adanya persetubuhan dengan akad yang sah, fasid maupun karena zina. Dalam hal ini sama dengan persetubuhan tentang kewajiban iddahnya, begitu pula sebaliknya wajib beriddah dalam perkawinan yang batal bila mana terjadi persetubuhan (Sayyid Sabiq, 1996 : 150).

B. Faktor – Faktor Perbedaan Pendapat Tentang Iddah Perempuan Hamil Karena Zina.

Para ulama madzhab sepakat tentang wajibnya perempuan beriddah baik diceraikan atau ditinggalkan mati suaminya dalam keadaan hamil. Walaupun ada perbedaan, itu sifatnya hanya terletak pada selang hitungan waktu.

Iddah itu dianggap ada apabila terjadi sebuah ikatan perkawinan bagi perempuan yang kemudian perkawinan tersebut dikatakan rusak atau putus secara hukum (baik menurut hukum Islam maupun undang – undang perkawinan tahun 1974).

Adanya perkembangan waktu pemahaman akan iddah juga berkembang, terutama para ulama kita dituntut peka akan perkembangan lingkungan yang ada disekitarnya. Walaupun persoalan iddah itu dikatakan ada bagi perempuan karena perkawinan perempuan itu sendiri terputus atau gugur. Persoalan lain adalah bagaimana kalau perempuan hamil karena zina, apakah perempuan zina dapat dimasukkan dalam persoalan iddah. Dalam persoalan itu terjadi perbedaan pendapat.

Adapun faktor – faktor perbedaan pendapat mengenai istimasi hukum tentang iddah perempuan yang hamil karena zina dalam Islam dilatarbelakangi oleh dua faktor dasar yaitu :

1. Berbeda dalam menafsirkan ayat – ayat Al – Qur'an

Perbedaan pendapat tentang iddah perempuan yang hamil karena zina ini disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam

menginterpretasikan ayat Al - Qur'an yang membicarakan mengenai wanita yang berbuat zina. Dalam penjelasan diatas telah dikemukakan bahwa dengan adanya Iddah pasti diawali dengan sebuah perkawinan yang sah dan telah menjadi kesepakatan para ulama, hal ini dilakukan karena semata - mata untuk menjaga keturunan sekaligus sebagai langkah awal untuk mengetahui sterilisasi rahim seorang perempuan. namun terlepas pada sebuah pernikahan yang sah apakah seorang wanita yang hamil diluar pernikahan haruslah menjalani Iddah setelah melahirkan atau tidak? =>

Akibatnya dalam menanggapi persoalan ini para ulama' berbeda pendapat dari hasil kajiannya. dimana inti persoalannya terletak pada penafsiran ayat al - qur'an sebagai sumber pokok ajaran islami. Akan tetapi perlu juga menggaris bawahi, bahwa istimasi hukum secara shorih dalam al - qur'an masih belum didapati tentang iddah perempuan hamil karena zina sehingga hasil kajiannya yang diperoleh lebih merupakan dari sebuah bentuk penggabungan anatar ayat al - qur'an yang menerangkan tentang iddah wanita yang berzina dengan perempuan yang menjalani iddah lantaran ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya bahkan lebh jauh lagi merupakan bentuk analogi saja yang merupakan hasil Ijtihad diantara para ulama itu adalah :

Hanafi menyatakan bahwa yang diuraikan dalam surat An -Nur dan An - Nisa' sama sekali tidak bisa digunakan untuk mengadopsi

kandungan hukum dalam rangka meneukan indikasi penyelesaian persoalan tersebut, sehingga mahzab ini dalam pendapatnya cenderung pada tatanan penggunaan rasional belaka yakni seorang laki – laki boleh malakukan akad nikah dengan wanita yang berzina walau hanya sekalipun. Perlu dipertegas bahwa madzab tidak memperbolehkan untuk mencampurinya sebelum ia (wanita) menjaiani iddah atau sampai melahirkan jika mereka hamil akibat zina.

Hambali menyatakan bahwa seorang wanita wajib menjaiani iddah, sedangkan bagi mereka yang hamil akibat perbuatan tersebut, maka iddahnya, sampai ia melahirkan janin yang berada dalam rahimnya hal ini dilakukan karena madzhab lebih menekankan pada penggunaan analogi ayat – ayat iddah untuk menemukan ketentuan – ketentuan dalam rangka penyelesaian implikasi persoalan yang dihadapi.

2. Perbedaan pendapat tentang adanya masalah sebagai tujuan pokok dalam islam.

Adanya perbedaan pendapat disatu sisi karena dilatar belakangi dengan adanya sebuah masalah yang terkandung didalamnya. Hal ini bisa kita temukan pada aksioma dasar tentang pendapat para ulama mengenai iddah itu sendiri. Sehingga akibatnya perbedaan demi perbedaan tidak bisa dielakkan kembali karena faktor pemikiran

mahzab yang satu dengan yang lainnya sangat sukar untuk dikompromikan dan bukan berarti tidak bisa tetapi begitulah adanya. Sebagai ceminan akses dari latar belakang manajemen pendidikan yang dialami ketika para mujtahid menuntut ilmu, terbukti dengan adanya masalah dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa menurut hambali menyatakan tidak membolehkan melakukan pernikahan dengan wanita berzina dengan kata lain jika ia (Wanita) ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka ia wajib menjalani iddah seperti layaknya seorang wanita yang ditinggal mati atau ditalak suaminya karena demi menjaga kemaslahatan yakni untuk menjamin kesesuaian keturunan yang sah serta kesehatan anak yang akan dilahirkan. Bagi wanita yang hamil karena zina jika ia ingin melangsungkan akad nikah maka ia harus menunggu sampai ia melahirkan. Tujuan yang terkandung dalam hal ini agar sperma laki – laki yang sah tidak bercampur baur atau mengairi ladang yang sudah digarap oleh orang lain hasil zina. Lebih jauh lagi janin yang terdapat dalam rahim wanita tersebut, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu serta kerabat ibunya dengan demikian, risikan sekali kiranya apabila seorang laki – laki menikahi wanita yang berzina baik dalam keadaan hamil maupun tidak dalam iddah sebelumnya.

Hanafi menyatakan hal – hal yang bersifat primer belakang adalah bertitik tolak kepada lima perkara yaitu : Agama, Jiwa, Akal,

Kehormatan dan Harta. Diantara lima perkara tersebut adalah menjaga kehormatan wanita yang hamil karena zina boleh dinikahi tanpa menunggu iddah atau sampai melahirkan bagi wanita yang hamil, tetapi ia laki – laki masih tidak bolehkan untuk menggaulinya. Pendapat ini dikeluarkan lantaran mempunyai aspek masalah bagi wanita yakni demi menjaga martabat wanita dalam rangka menutupi aib dirinya dan keluarganya didepan khalayak ramai.

Disamping perbedaan diatas, perbedaan yang paling mendasar adalah persoalan iddah bagi perempuan hamil karena zina adalah status tersebut sebab iddah sendiri itu ada karena adanya perkawinan yang putus atau jatuh karena hukum. Dan hamil karena zina adalah perbuatan yang tidak melalui sebuah proses perkawinan yang sah dalam pandangan hukum, sehingga secara hukum perempuan hamil karena zina tidak mempunyai iddah.